



Kontribusi Kuwait Dalam Mediasi Konflik Qatar Dengan Arab Saudi 2017-2019

Nabilah Ratna Dewi, Tri Cahya Utama, Shary Charlotte

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In 2017 there was a diplomatic crisis among members of The Gulf Cooperation Council (GCC), specifically between Saudi Arabia and its regional allies, namely the United Arab Emirates, Egypt, Bahrain, Yemen and Qatar. The crisis caused Saudi Arabia and several of its allies to blockade Qatar. This study aims to analyze the contribution of Kuwait as a mediator in the conflict between Qatar and Saudi Arabia. The data collection method used is a secondary method. This study uses qualitative data analysis techniques. Based on the results of the analysis, it is known that as a form of contribution in resolving the Arab-Qatar conflict, Kuwait made several efforts, namely: efforts through bilateral meetings with conflicting parties and efforts through the GCC Summit. Kuwait's mediation efforts met a bright spot at the 41st GCC Summit in 2021 which was held in Riyadh, Saudi Arabia. This summit resulted in a peace agreement between Saudi Arabia and Qatar. The causes of Kuwait's contribution to mediating the conflict between Qatar and Saudi Arabia can be divided into two factors, namely: internal and external. Internal factors consist of political and economic factors. The external factors are related to regional security.

Keywords: *Blockade, Conflict, Qatar-Saudi Arabia, Contribution, Kuwait*

PENDAHULUAN

Pada 2017, terjadi krisis diplomatik di antara anggota GCC (*Gulf Cooperation Council*) tepatnya antara Arab Saudi bersama sekutu regionalnya, yaitu Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yaman dengan Qatar. Krisis tersebut menyebabkan Arab Saudi dan negara-negara sekutunya memutuskan untuk memblokade Qatar, penyebab dari blokade ini karena perbedaan prioritas, kepentingan, dan pandangan politik antara Qatar dengan negara-negara tetangganya tersebut. Dalam hal ini Arab Saudi menuduh dan meminta Qatar untuk berhenti mendukung Iran dan Turki, serta menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap teroris oleh Arab Saudi beserta sekutu. (Vakil, 2018).

Hampir tiga tahun setelah Arab Saudi beserta aliansinya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar serta memberlakukan blokade darat, udara, dan laut, krisis Teluk tampak menunjukkan sedikit tanda-tanda peluang untuk resolusi konflik. Terdapat beberapa negara berupaya berkontribusi melakukan mediasi konflik diantaranya adalah

Kuwait, Turki, dan Indonesia. Turki lewat Presiden Erdogan dan Indonesia lewat Presiden Jokowi satu suara untuk mendorong Qatar dan negara Teluk Arab menyelesaikan persoalan politik ini dengan jalan berdialog. Diantara tiga negara tersebut, Kuwait merupakan yang paling intens berkontribusi mendorong terciptanya resolusi konflik antara Qatar dengan Arab Saudi.

Kuwait selama ini diketahui menjadi negara mediator dalam mendamaikan atau meleraikan pihak-pihak yang berkonflik di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Arab Saudi dan Negara Teluk (Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yaman dan dua negara lainnya) mengambil langkah tegas dengan melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar setelah negara itu disinyalir mendukung kelompok terorisme dan menjalin hubungan yang cukup mesra dengan Iran. Bersama dengan Amerika Serikat, Kuwait melihat bahwa kestabilan dari kawasan Teluk merupakan salah satu hal yang harus dijaga dikarenakan banyaknya konflik yang terjadi di kawasan tersebut. (Wintour, 2017). Kuwait, tidak seperti Negara Teluk lainnya, memilih untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Qatar dan di saat yang bersamaan memilih untuk menjadi aktor yang memediasi konflik antar-Negara Teluk tersebut. (Turak, 2018). Ada beberapa penelitian yang pernah menganalisis konflik blokade Qatar oleh Arab Saudi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Octaviarie (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Alasan Kebijakan Arab Saudi Melakukan Blokade Terhadap Qatar” menyimpulkan bahwa terdapat aspek struktur dan identitas dibalik tindakan blokade Arab Saudi beserta aliansinya terhadap Qatar. Ada perbedaan identitas ideologi di antara mereka, yaitu: Qatar memiliki kedekatan dengan organisasi teroris yaitu Ikhwanul Muslimin dan Iran yang menyebarkan revolusi Islam. Hal inilah yang menjadi pemicu utama Arab Saudi beserta aliansinya melakukan tindakan blokade.

Turmuzi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kebijakan Blokade Qatar Ditinjau Dari Perspektif *Decision Making*” menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi Arab Saudi melakukan blokade terhadap Qatar. Faktor tersebut terdiri atas faktor nasional dan faktor internasional. Faktor nasional dari Arab Saudi yaitu: (1) ketidaksukaan para pemimpin politik dalam negeri Arab Saudi terhadap pemimpin Qatar; dan (2) adanya alasan historis di mana Arab Saudi melihat Qatar sebagai negara yang berpotensi menjadi ancaman. Dendam masa lalu oleh Arab Saudi terhadap Qatar karena melihat transformasi mereka dari yang dianggap sebagai *vassal state* menjadi negara yang cukup kuat di regional membuat para pemimpin politik dalam negeri Arab Saudi cemas karena dapat mengganggu hegemoni kekuasaan Arab Saudi di kawasan. Serta ketidaksukaan Kerajaan Arab Saudi terhadap kepemimpinan Qatar oleh Khalifa Al Thani yang bersebarangan cara politik dengan negara-negara GCC dan Arab Saudi. Hal ini dianggap sebagai faktor pendorong yang cukup kuat dikarenakan Arab Saudi melihat diri mereka adalah pemimpin kawasan Teluk, dan untuk suatu negara melawan kepentingannya merupakan salah satu bentuk ancaman bagi Arab Saudi itu sendiri. Sedangkan untuk Faktor internasional dari keputusan Arab Saudi memblokade adalah: (1) persaingan kekuasaan dengan Iran, yang merupakan poros lain di kawasan Timur Tengah; (2) Diberikannya bantuan kepada Ikhwanul Muslimin oleh Qatar, yang merupakan organisasi islam yang dianggap ancaman oleh Arab Saudi; dan (3) Dukungan dari negara-negara sekutu Arab Saudi. Hubungan baik antara Qatar dan Iran dianggap sebagai ancaman karena posisi perpolitikan di Timur Tengah menempatkan Arab Saudi berlawanan dengan Iran, sehingga kedekatan antar-keduanya dianggap dapat mengganggu hegemoni Arab Saudi di kawasan. Lalu, kedekatan dan kucuran dana Qatar ke organisasi Ikhwanul Muslimin dianggap ancaman karena Ikhwanul Muslimin

merupakan organisasi yang berhasil menggulingkan kepemimpinan di Mesir sehingga Arab Saudi takut pengaruh tersebut menyebar ke negaranya Serta yang terakhir terdapat dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab, serta Bahrain dalam kebijakan blokade memperlihatkan bahwa posisi Arab Saudi untuk memblokade bukan kebijakan yang hanya mementingkan negara sendiri, namun juga mengambil pandangan dari negara-negara sekutunya.

Kinninmont (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Gulf Divided: The Impact of Qatar Crisis*” menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Teluk sangat dinamis dikarenakan salah satu faktor pendorong yang dapat menyelesaikan konflik hanyalah terdapat di tangan para pemimpin politik. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa resolusi konflik mungkin tercapai dilihat dari beberapa prospek seperti: dorongan Amerika Serikat, dorongan ekonomi, ataupun *external shock* yang memaksa GCC untuk bekerja sama dan menyampingkan konflik yang ada.

Köse dan Ulutaş (2017) dalam tulisannya yang berjudul “*Regional Implications of the Qatar Crisis: Increasing Vulnerabilities*” menyimpulkan bahwa konflik di kawasan Teluk semakin memanas sesaat setelah Arab Spring, di mana terdapat perang ideologis antara negara anggota GCC yang pro-perubahan dengan mereka yang pro-status quo. Selain itu konflik Teluk tidak hanya terjadi antar-negara anggota, tetapi juga dengan negara di kawasan Timur Tengah lainnya seperti Iran, serta permasalahan horizontal yang berbentuk sektarian antara sesama negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Selama berlangsungnya konflik antara Qatar dengan Arab Saudi, Kuwait memang diketahui aktif berperan sebagai mediator yang berusaha untuk mempertemukan kedua negara yang berseteru tersebut. Di dalam hal ini, Kuwait memegang peranan sebagai *small state mediator*. Bahkan peran Kuwait sebagai *small state mediator* dianggap lebih signifikan dibandingkan peran negara adidaya, seperti Amerika Serikat terhadap resolusi konflik Qatar dan Arab Saudi. (Fraihat, 2020). Oleh karena itu, akan lebih menarik untuk mempelajari dengan lebih mendalam mengenai peran Kuwait di dalam penyelesaian konflik antara Qatar dengan Arab Saudi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi Kuwait sebagai mediator dalam konflik Qatar dan Arab Saudi.
2. Untuk menganalisis penyebab Kuwait berkontribusi untuk memediasi konflik antara Qatar dengan Arab Saudi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *decision making theory* dan teori resolusi konflik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Decision Making Theory

Decision Making Theory bertitik tolak pada proses membandingkan dan memilih sekumpulan alternatif yang direncanakan, hal yang menjadi pertimbangan berlandaskan pada semua kegiatan di mana orang mencoba untuk menentukan tujuan dari pelaku, jika di aspek politik *decision making* dioperasionalkan sebagai penggambaran untuk negara dalam membuat kebijakan. (Xing, 2015).

Disisi lain *decision making theory* memiliki lingkup baik dari segi sistem domestik (internal) dan sistem internasional (eksternal) yang menjadi pertimbangan suatu negara dalam membuat suatu kebijakan. Adanya faktor internal dan eksternal setidaknya membentuk preferensi negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Faktor internal bertitik tolak pada hubungan antara masyarakat dengan negara, sedangkan faktor

eksternal bertitik tolak pada aspek dan struktur internasional seperti relasi dengan negara lain serta kondisi *global politics*. (Synder, Bruck, & Sapin, 1962).

Resolusi Konflik

Resolusi konflik sendiri dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memilih menghindari dan meminimalisir konflik bisa melalui pencegahan konflik hingga penyelesaian konflik secara damai. Jika diasumsikan bahwa konflik bisa menjadi penyebab perubahan pribadi dan sosial yang positif, hadirnya resolusi konflik menitikberatkan pada aspek pencegahan, penurunan, berhenti, atau mengubah konflik kekerasan menggunakan metode damai. (Miall, Romsbotham, & Woodhouse, 1999).

Salah satu aspek resolusi konflik adalah mediasi. Mediasi merupakan sebuah proses yang memerlukan pihak atau aktor ketiga yang bersifat tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berkonflik. Adanya kehadiran mediator setidaknya akan memberikan ruang untuk saling berkomunikasi bagi pihak yang bersengketa yang fokus pada masalah aktual dari perselisihan dan menemukan hasil yang diinginkan bersama untuk semua pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian perselisihan. (Vestergaard, 2011). Dalam penelitian ini, Kuwait menjadi pihak ketiga yang membantu memediasi antara konflik Qatar dan Arab Saudi. Tentunya sebagai pihak ketiga, posisi Kuwait haruslah netral dan tidak memihak salah satu pihak.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Kuwait merupakan aktor yang membantu memediasi pihak-pihak yang berkonflik (Qatar & Arab Saudi serta aliansinya). Oleh karena itu, berikut ini disajikan tabel penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang mengkaji Kuwait sebagai mediator konflik.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Abdulhadi Alajmi (2018)	The Gulf Crisis: An Insight into Kuwait's Mediation Efforts	Upaya mediasi Kuwait tampaknya bertumpu pada warisan sejarahnya yang mengakar dan mantap. Visi Kuwait untuk mediasi dalam upaya politik luar negeri tetap sama selama berabad-abad. Sifat mediasi ini terikat pada kemampuan sistem politik saat ini dan warisan sejarahnya dan apa yang ditawarkan, secara tidak memihak, untuk semua pihak yang berkonflik. Keberhasilan upaya Kuwait sebagai mediator dalam konflik Qatar-Arab Saudi ditentukan oleh 2 faktor, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurangi atau menetralkan tuntutan yang mempengaruhi kedaulatan dan memaksakan perwalian pada pihak manapun. 2) Kemampuan mediator untuk mempertahankan dan menopang dirinya berdasarkan pertimbangan realistis bergantung pada fleksibilitas situasi dan pengalaman sejarah.

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
2.	Mohammad Naser (2017)	Kuwait's Foreign Policy towards Regional Issues in the Middle East from 2003 to 2014	Secara regional, Kuwait memiliki politik luar negeri yang unik yang bercirikan netralitas. Hal ini pula yang membuat mediasi merupakan salah satu alat aktivasi kebijakan luar negeri. Pendekatan sistematis kemampuan finansial Kuwait memberikan kekuatan, pengaruh dan kredibilitas untuk berperan sebagai mediator dalam konflik regional guna mengurangi ketegangan antara dunia Arab dan Timur Tengah. Peran ini sendiri meningkatkan kredibilitas Kuwait sebagai negara "sentral" dalam politik Arab. Peran Kuwait adalah sebagai tanggapan atas panggilan dari luar negeri atau sebagai inisiatif yang diambil oleh Kuwait sendiri. Peran ini dapat dijelaskan dengan "banyak yang mengharapkan Kuwait memiliki peran mediasi dalam banyak masalah dan konflik di kawasan".

Sumber: Alajmi (2018:547-548) & Naser (2017:104)

Penelitian ini termasuk tipe atau jenis penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan tipe penelitian yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang penyebab suatu kejadian atau gejala terjadi dan membuktikan adanya hubungan pengaruh-mempengaruhi, atau adanya hubungan sebab akibat. Output dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Pada dasarnya di dalam penelitian eksplanatif sebenarnya sudah terkandung penelitian eksploratif dan deskriptif. (Prasetyo & Lina, 2010). Penelitian eksplanatif menguraikan penyebab Kuwait berkepentingan untuk menyelesaikan konflik antara Qatar dengan Arab Saudi.

Tabel 2. Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional
1.	Blokade	Bentuk perang menggunakan tekanan perekenomian dengan cara mencegah kapal atau pesawat terbang atau transportasi apapun dari udara, laut dan darat dari semua negara musuh ataupun negara netral. Mereka dilarang memasuki ataupun keluar dari zona tersebut saat berada di bawah kendali suatu aktor negara. Tujuan utama dari blokade adalah membuat perekonomian negara yang diblokade lumpuh, sehingga segala bentuk aspek perdagangan akan mengalami hambatan saat suatu negara sedang di blokade. Adapun ciri-ciri tindakan blockade adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan blokade biasanya pada pembatasan terhadap ekonomi negara. b. Pembatasan wilayah teritorial darat, laut dan udara terhadap negara yang di blokade, misalnya

No.	Variabel	Definisi Operasional
		pemblokadean jalur laut biasanya kapal-kapal negara yang memblokade ditempatkan agak jauh dari pantai, sehingga dalam blokade tidak ada bentuk kontak senjata.
2.	Konflik	Konflik adalah interaksi sosial antar satu pihak dengan pihak lain (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan kepentingan.
3.	Resolusi konflik	Resolusi konflik adalah upaya penanganan sebab-sebab terjadinya permusuhan dan berusaha menyelesaikan permusuhan tersebut dengan membangun hubungan baru yang tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau aktor-aktor yang berselisih.

Sumber: Penulis (2020)

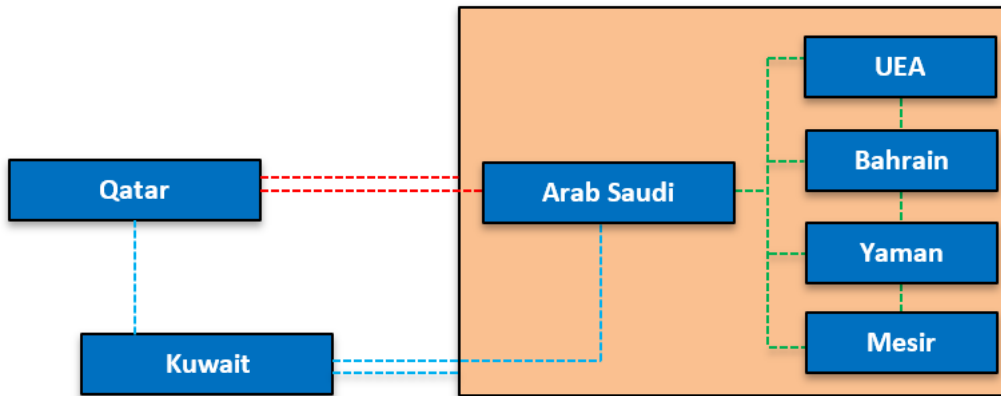
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi literatur, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal nasional maupun internasional, serta bahan-bahan lain yang mendukung dan berkaitan dengan topik penelitian termasuk media massa seperti internet, koran serta majalah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya untuk memperjelas makna data penelitian dengan cara mengumpulkan data menurut klasifikasi tertentu. (Siyoto & Sodik, 2015).

PEMBAHASAN

Aktor Konflik

Secara teoritis, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai atau percaya bahwa mereka mempunyai tujuan yang berseberangan. (Fisher, 2001:4). Malik dalam (Surbakti, 2010:160) mengungkapkan bahwa dalam sebuah konflik terdapat beberapa aktor yang terlibat yang dapat diklasifikasikan sebagai aktor utama dan aktor sekunder (pihak ketiga). Aktor sekunder berperan sebagai mediator dalam konflik. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Dahendorf dalam (Surbakti, 2010:160) bahwa dalam konflik terdapat beberapa aktor yakni: aktor utama dan aktor yang berperan sebagai mediator.

Merujuk pada dasar klasifikasi di atas, aktor konflik dalam penelitian “Kontribusi Kuwait Dalam Penyelesaian Konflik Qatar Dengan Arab Saudi 2017-2019” dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu aktor utama dan aktor sekunder (pihak ketiga). Sejalan dengan latar belakang dalam penelitian ini, negara yang menjadi aktor utama adalah Qatar dan Arab Saudi bersama aliansinya (Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, & Mesir). Adapun negara yang menjadi aktor pihak ketiga adalah Kuwait. Berikut ini disajikan *conflict mapping* dalam konflik blokade ini:



Gambar 1. Conflict Mapping “Blokade Qatar Oleh Arab Saudi & Aliansinya”

Sumber: Analisis Penulis (2021)

Keterangan:

	: Very good relationship
	: Good relationship
	: Bad relationship
	: Saudi Arabia & its Alliances

Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat bahwa Arab Saudi dan aliannya memiliki hubungan yang buruk dengan Qatar. Arab Saudi memiliki hubungan yang sangat baik dengan aliannya (UEA, Bahrain, Yaman, Mesir). Adapun Kuwait memiliki hubungan yang baik dengan para aktor yang berselisih baik itu Qatar maupun Arab Saudi beserta aliannya. Buruknya hubungan Qatar-Arab Saudi & aliannya ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik dan melakukan blokade terhadap Qatar. Blokade ini berupa pemutusan akses darat, laut, dan udara. Tindakan blokade oleh Arab Saudi dan aliannya merupakan bentuk kemarahan kepada Qatar karena disinyalir memberikan dukungan pendanaan kepada kelompok-kelompok ekstremis seperti Ikhwanul Muslimin dan memiliki hubungan dekat dengan Iran yang merupakan musuh utama Arab Saudi dan aliannya.

Qatar memberikan sanggahan bahwa tidak ada bukti keterlibatan Qatar memberikan dukungan terhadap organisasi tersebut. Justru sebaliknya, pemerintahannya yang terus konsisten memerangi terorisme hingga ke akar-akarnya. Tetapi, sanggahan yang disebut tersebut pada akhirnya tidak merubah pendirian Arab Saudi dan aliannya untuk terus melakukan blokade terhadap Qatar. (Triyono, 2018:1). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Qatar dan Arab Saudi sama-sama anggota GCC (*Gulf Cooperation Council*). Konflik blokade secara nyata menghadirkan keretakan dalam tubuh GCC yang dapat berimplikasi pada keamanan kawasan teluk. Oleh karena itu, konflik ini memicu adanya intervensi aktor sekunder (pihak ketiga) yang berperan menjadi mediator dan mengupayakan resolusi agar konflik tersebut bisa berakhir. Adapun aktor yang berperan menjadi mediator adalah Kuwait.

Kuwait memiliki kualitas yang mumpuni sebagai mediator karena memiliki pengaruh atas pihak yang berselisih yang dapat membantu proses dengan pasti terutama

pada saat menemui jalan buntu. Kuwait adalah anggota pendiri GCC dan amirnya yaitu Sheikh Sabah Al-Jaber Al-Sabah sangat dihormati oleh semua kepala negara GCC. Hal ini memberi kekuatan moral untuk menerapkan tekanan saat dibutuhkan. (Fraihat, 2020:80).

Penyebab Konflik

Adapun penyebab terjadinya konflik Qatar dan Arab Saudi pada tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

1. *Manuver Politik Qatar dan Pendanaan Untuk Kelompok Islam Radikal*: Penyebab utama konflik antara kubu yang dipimpin Arab Saudi dan pemerintah Qatar adalah pendanaan dan dukungan politik Doha untuk kelompok-kelompok Islam yang aktif secara politik dan berideologi ekstrim yang sering berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Arab Saudi dan negara GCC (*Gulf Cooperation Council*) lain merasa terancam oleh potensi masuknya organisasi yang ekstrim. Organisasi-organisasi tersebut adalah Alqaidah, ISIS, Nusa Front, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbullah. Sikap politiknya adalah menciptakan lingkungan negatif yang dapat meningkatkan bahaya bagi keamanan serta stabilitas kawasan Teluk.
2. *Hubungan Qatar dengan Iran*: Penyebab utama lainnya adalah hubungan yang cukup mesra antara Qatar dengan Iran. Hal ini dilihat oleh sebagian besar negara mayoritas Sunni lainnya di Teluk sebagai ancaman yang berkembang terhadap keamanan atau bahkan keberadaan mereka. Kekusutan hubungan Qatar dengan beberapa negara teluk, terutama Arab Saudi sebenarnya berawal ketika Qatar yang dipimpin oleh Emir Hamad yang menandatangani perjanjian bersama Iran terkait pengembangan produksi LNG (*Liquefied Natural Gas*). Perjanjian ini dimulai pada tahun 1995. (Octaviane, 2019).
3. *Efek Arab Spring*: Meskipun ini bukan penyebab utama, namun tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa Arab Spring berkontribusi dalam melonggarnya hubungan Arab Saudi dengan Qatar yang berimbas pada blokade yang dilakukan Arab Saudi dan sekutunya terhadap Qatar pada tahun 2017. Dalam peristiwa Arab Spring, persaingan antara Arab Saudi dan Qatar membuat mereka mendukung kelompok yang berbeda dan seringkali menunjukkan persaingan di Suriah. Contohnya, di salah satu wilayah di sekitar Damaskus, Arab Saudi mengirimkan uang dan senjata ke Jaysh al-Islam, sedangkan Qatar mendukung kompetitornya, Faylaq al-Rahman.
4. *Supremasi Arab Saudi Terancam oleh Qatar*: Hanya sedikit literatur yang menyinggung penyebab yang satu ini. Namun demikian, perlu kita kaji lebih jauh. Arab Saudi dikenal sebagai negara dengan kekuatan regional terbesar, karena kekayaan minyaknya yang besar. Disisi lain, selama dua dekade terakhir ini, Qatar tampil menjadi salah satu negara paling berpengaruh di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah. Buktinya adalah untuk negara yang baru didirikan pada tahun 1971 dan dengan salah satu ukuran geografis dan demografis terkecil di Timur Tengah, Qatar menjadi pialang kekuasaan yang mengejutkan karena kekuatan finansialnya untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh di kawasan Teluk Persia, Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejak dimulainya Arab Spring pada akhir 2010, lanskap regional telah berubah, begitu pula dengan kebijakan Qatar. Selama Arab Spring, Qatar beralih dari peran kebijakan luar negeri tradisionalnya sebagai mediator dalam beberapa perselisihan di Kawasan Timur Tengah hingga Kawasan Afrika Utara serta mengambil peran intervensionis sebagai pendukung utama gerakan protes di Timur Tengah dan Afrika Utara. (Febriandi, 2018:3).

Tren Kuwait Sebagai Mediator Konflik

Secara teoritis, mediasi dianggap sebagai cara damai pada penyelesaian perselisihan internasional dimana mediator mengambil peran atau berkontribusi untuk menyelesaikan perselisihan yang ada melalui diskusi dan duduk di satu meja. Mediasi ini berupaya menyelesaikan konflik tersebut dengan cepat dan memuaskan bagi semua pihak terkait. Tujuan mediasi adalah untuk mempersempit perbedaan antara pandangan dan memungkinkan diskusi antara pihak yang berkonflik. Mediator sendiri harus tidak memihak dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. (Alajmi, 2018:537).

Dalam konflik blokade Qatar yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan aliansinya (Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, dan Mesir), upaya mediasi Kuwait merupakan upaya untuk menjembatani keretakan diantara mereka. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai apa saja upaya atau kontribusi Kuwait sebagai mediator dalam konflik Qatar dan Arab Saudi, terlebih dahulu kita harus melihat tren Kuwait sebagai mediator konflik. Setelah itu, nantinya kita akan menemukan benang merah mengenai seberapa mumpuni Kuwait sebagai mediator konflik.

Upaya mediasi Kuwait pada dasarnya bertumpu pada warisan sejarahnya yang mengakar. Hal ini terbukti dari peran aktif Kuwait dan kehadirannya yang berpengaruh di beberapa isu internasional, regional, dan Arab. Kuwait aktif di level diplomatik selama beberapa dekade yang bertepatan dengan pendirian dan kemunculan emirat itu sendiri. Berikut ini disajikan tabel tren Kuwait sebagai mediator konflik:

Tabel 3. Tren Kuwait Sebagai Mediator Konflik

No.	Konflik	Tahun	Keterangan
1.	Perang saudara memperebutkan kekuasaan di Bahrain	1864	Upaya mediasi Kuwait berhasil
2.	Mesir-Arab Saudi	1965	Upaya mediasi Kuwait berhasil
3.	Palestina-Yordania	1970	Upaya mediasi Kuwait berhasil
4.	Bahrain-Inggris	1971	Upaya mediasi Kuwait berhasil
5.	Yaman Selatan-Yaman Utara	1972 & 1984	Upaya mediasi Kuwait berhasil
6.	Turki-Bulgaria	1980-an	Upaya mediasi Kuwait berhasil
7.	Senegal-Mauritania	1989	Upaya mediasi Kuwait berhasil
8.	Lebanon	1989	Upaya mediasi Kuwait berhasil
9.	Arab Saudi-Libya	2010	Upaya mediasi Kuwait berhasil

Sumber: Alajmi (2018:540-541)

Tren Kuwait sebagai mediator konflik sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti tak terbantahkan tentang peran penting Kuwait dalam memecahkan masalah. Keberhasilan Kuwait dalam upaya mediasi yang telah dilakukan sejak tahun 1864 (Konflik Perang Saudara memperebutkan kekuasaan di Bahrain) hingga tahun 2010 (Konflik Arab Saudi-Libya) menyiratkan bahwa negara ini dapat dikatakan sangat

mumpuni atau memiliki kapabilitas sebagai mediator konflik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Kuwait kembali tampil sebagai mediator dalam konflik blokade Qatar oleh Arab Saudi dan aliansinya yang meletus pada tahun 2017.

Kuwait Sebagai Mediator Dalam Konflik Qatar dan Arab Saudi

Upaya Melalui Pertemuan Bilateral Dengan Para Pihak

Sebagai bentuk kontribusi Kuwait dalam penyelesaian konflik ini, salah satu upayanya adalah melakukan pertemuan bilateral dengan para pihak yang berkonflik. Emir Kuwait (Syekh Sabah) mengunjungi Arab Saudi pada hari kedua blokade yaitu 6 Juni 2017, dan UEA pada 7 Juni 2017 untuk bertemu dengan para kepala negara. Dia mengirim surat, menelepon dan mengutus Menteri Luar Negeri sebagai bagian dari mobilisasi skala penuh untuk meredakan konflik. Adapun poin yang dibicarakan dalam kunjungan ini adalah bahaya yang ditimbulkan dari konflik ini. Konflik tidak hanya berdampak kepada pihak-pihak utama, tetapi juga bagi seluruh kerangka kerja kolaborasi di antara negara-negara GCC. Syekh Sabah memperingatkan bahwa konflik blokade ini mengakibatkan GCC runtuh. Oleh karena itu, dalam kunjungan tersebut Kuwait berupaya membujuk pemblokade agar mengakhiri blokadanya. Adapun isi bujukan Kuwait terhadap pihak yang bertikai adalah konflik blokade ini tidak hanya berimbas pada Qatar dan Arab Saudi, namun juga berimbas pada negara-negara teluk yang lain. Oleh karena itu, demi kebaikan bersama dan demi menjaga kekompakan GCC maka konflik ini tidak boleh diteruskan.

Pada Desember 2019, Syekh Sabah menugaskan Wakil Menteri Luar Negeri, Khaled Al-Jarallah untuk mengunjungi Emir Qatar dan Putra Mahkota Arab Saudi. Dalam kunjungan tersebut, Khaled Al-Jarallah bermaksud untuk memastikan intervensi Kuwait konstan selama krisis atau konflik berlangsung. Poin yang dibicarakan dalam kunjungan ini adalah posisi Kuwait dalam konflik blokade. Hasil akhir pembicaraan ini adalah Qatar maupun Arab Saudi menyukai Kuwait sebagai mediator karena Kuwait juga adalah negara Teluk dan lebih akrab dengan para pemimpin Teluk daripada kekuatan regional lainnya. (Alenezi, 2019:65). Pada awalnya Arab Saudi maupun Qatar memiliki sikap yang sama dalam hal siapa yang akan menjadi penengah konflik mereka, yaitu Kuwait. Ketika konflik ini baru saja meletus, Pemerintah Qatar meminta Kuwait menjadi mediator untuk meredakan tekanan diplomatik yang dijatuhkan Arab Saudi dan aliansinya. Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani menyampaikan pesan kepada pihak-pihak dalam konflik ini untuk memberikan waktu bagi Kuwait untuk menjadi mediator dalam krisis yang sedang berlangsung. Dikutip kantor berita Al Jazeera pada Selasa (6/6), Menlu Qatar (Sheikh Mohammed al-Thani) mengungkapkan bahwa bahwa Qatar meyakini perbedaan antara negara-negara Arab harus diselesaikan melalui dialog. (Wirawan, 2017).

Upaya Melalui KTT GCC

Tidak hanya pertemuan bilateral dengan para pihak yang berkonflik, Kuwait juga berusaha untuk membuat dialog di dalam GCC untuk membahasnya. Emir Kuwait terlibat dalam diplomasi saluran belakang antara Riyadh dan Doha untuk mengatasi hambatan yang menghalangi dialog serius di antara para pihak. Upaya mediasi Kuwait tidak dapat disangkal mencapai langkah penting karena mampu menyelenggarakan KTT Teluk ke-38 di Kuwait pada tanggal 5 Desember 2017, terlepas dari kenyataan bahwa keberhasilan ini dibarengi dengan rendahnya keterwakilan beberapa negara peserta: yaitu Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Negara ini hanya mengirimkan perwakilan di tingkat

menteri dan wakil menteri, sehingga memaksa mediator Kuwait untuk mengurangi durasi KTT menjadi satu hari, bukan dua hari seperti biasanya. Namun, dalam KTT ini para pihak bahkan gagal untuk menyetujui pendekatan bersama untuk menyelesaikan krisis.

Upaya mediasi Kuwait menemui titik terang pada KTT GCC ke 41 tahun 2021 yang dilaksanakan di Riyadh, Arab Saudi. Bentuk mediasi Kuwait adalah mediasi jalur damai melalui dialog para pihak yang bersengketa atau bertikai. Kuwait menyerukan “solidaritas dan stabilitas”. Substansinya adalah pentingnya persatuan di antara negara-negara GCC demi memperlambat keamanan kawasan, perdamaian, dan kemakmuran. Untuk mewujudkan hal ini, maka konflik blokade terhadap Qatar oleh Arab Saudi dan aliansinya harus diakhiri. (Sari, 2021). KTT ini akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan damai antara Arab Saudi dan Qatar. Arab Saudi bersama dengan negara pemblokade lainnya yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Yaman, dan Mesir sepakat mencabut blokade terhadap Qatar. Menindaklanjuti kesepakatan ini, Arab Saudi dan Qatar mulai membuka perbatasan darat utama pada tanggal 9 Januari 2021. Kemudian, pada tanggal 11 Januari 2021 penerbangan Arab Saudi-Qatar dan Qatar-Arab Saudi kembali dibuka. (Endarti, 2021). Kesepakatan ini jelas tidak terlepas dari campur tangan Kuwait sebagai mediator.

Penyebab Kuwait Berkontribusi Untuk Memediasi Konflik Antara Qatar Dengan Arab Saudi

Konflik blokade terhadap Qatar yang dilakukan oleh Arab Saudi dan aliansinya membuat Kuwait mengambil keputusan untuk campur tangan dan berkontribusi untuk memediasi konflik tersebut. Dalam *decision making theory* disebutkan bahwa terdapat lingkup baik dari segi sistem domestik (internal) dan sistem internasional (eksternal) yang menjadi pertimbangan suatu negara dalam membuat suatu keputusan. Adanya faktor internal dan eksternal setidaknya membentuk preferensi negara dalam membuat suatu keputusan. (Synder, Bruck, & Sapin, 1962). Merujuk pada teori ini, penyebab Kuwait berkontribusi untuk memediasi konflik antara Qatar dengan Arab Saudi dapat klasifikasikan ke dalam dua faktor, yakni: faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal

Politik: Sesaat setelah Arab Saudi dan aliansinya resmi memblokade Qatar, Kuwait khawatir akan diboikot di masa depan seperti Qatar. Para pemimpin dan intelektual di Kuwait mengatakan bahwa Kuwait mungkin juga akan diboikot dalam periode mendatang oleh negara-negara Teluk lainnya. Beberapa perwakilan parlemen Kuwait menyatakan bahwa Kuwait harus siap menghadapi kemungkinan boikot di masa depan jika permasalahan ini tidak menemukan titik terang (Alenezi, 2019:65). Posisi Kuwait sebagai mediator didukung penuh oleh parlemen di Kuwait City. Salah satu anggota parlemen yang bernama Ali al Deqbasi mengatakan:

“Kami berdoa agar Tuhan membantu Kuwait mewujudkan persatuan Teluk”.
(Newswire, 2017).

Kekhawatiran Kuwait bukan tanpa alasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu penyebab Qatar diblokade karena memiliki hubungan baik dengan Iran. Kuwait pun juga memiliki hubungan baik dengan negara tersebut. Sedangkan, negara-negara pemblokade memiliki hubungan buruk dengan Iran. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada jaminan bahwa Kuwait tidak diblokade oleh negara Teluk lainnya di masa depan. Walaupun terdapat beberapa pernyataan lain yang mengecualikan kemungkinan tersebut, kekhawatiran ini tetap ada di lingkaran politik Kuwait dan secara luas di kalangan

intelektual. Beberapa elit di Arab Saudi sempat mengkritik Kuwait dan menuduhnya tidak mengambil sikap yang jelas dalam konflik blokade ini. Atas dorongan para pemimpin, parlemen, dan intelektual Kuwait, maka Kuwait memutuskan untuk terlibat sebagai mediator dalam konflik Qatar dan Arab Saudi.

Ekonomi: Kuwait memiliki ekonomi berbasis minyak bumi. Minyak bumi adalah produk ekspor utama. Dinar Kuwait adalah unit mata uang dengan nilai tertinggi di dunia. Menurut Bank Dunia, Kuwait adalah negara terkaya ketujuh di dunia dalam hal pendapatan per kapita. Ini adalah negara GCC per kapita terkaya kedua setelah Qatar. (Alenezi, 2019:57-58). Pemutusan hubungan Arab Saudi dengan Qatar mempengaruhi stabilitas ekonomi di kawasan teluk termasuk ekonomi Kuwait. Kuwait, Qatar, dan Arab Saudi adalah sama-sama menggantungkan devisanya pada sektor minyak bumi. Ketiga negara ini adalah anggota OPEC.

Dalam OPEC terdapat kesepakatan pemangkasan produksi minyak anggota OPEC sebesar 1,2 juta barel per hari (bph). Konflik blokade ini mengganggu kesepakatan ini dan membuat Qatar condong ke arah Iran. Hal ini membuat kapasitas produksi minyak Qatar sulit ditahan sesuai dengan kesepakatan. Alhasil, suplai minyak di pasar dunia melimpah, sehingga harga minyak tersebut menjadi turun. Konflik blokade ini jelas dapat mengganggu perekonomian di Kuwait. Keterkaitan antara blokade ini dengan perekonomian Kuwait dapat dikatakan cukup besar karena negara ini juga merupakan produsen minyak bumi. Penurunan harga minyak bumi juga akan berimplikasi pada devisa Kuwait. (Agustinus, 2017:1). Berangkat dari faktor ekonomi ini, maka Kuwait memutuskan untuk terlibat sebagai mediator dalam konflik Qatar dan Arab Saudi.

Faktor Eksternal

Konflik blokade ini dapat mengganggu kestabilan kawasan Teluk yang tentunya akan berimplikasi pada aspek keamanan, termasuk keamanan nasional Kuwait. Apabila misalnya konflik ini dibiarkan berlarut-larut dan semakin memanas, maka tidak mustahil jika eskalasi konflik melibatkan kontak militer. Tentunya tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi. Namun, jika hal ini terjadi, maka kawasan Teluk dapat menjadi medan perang. Hal tersebut jelas akan merugikan semua pihak terutama negara-negara teluk sendiri.

Kuwait takut akan ekspansi dan perkembangan krisis ke arah yang tidak dapat ditentukan. Pangeran Kuwait khawatir Dewan Kerjasama Teluk (GCC) akan runtuh sebagai akibat dari krisis ini. Selain itu, konflik ini akan mengganggu stabilitas hubungan diplomatik Kuwait dengan Qatar. Berangkat dari faktor-faktor eksternal ini, maka Kuwait memutuskan untuk terlibat sebagai mediator dalam konflik Qatar dan Arab Saudi.

PENUTUP

Sebagai bentuk kontribusi dalam penyelesaian konflik Arab-Qatar, Kuwait melakukan beberapa upaya, yaitu: upaya melalui pertemuan bilateral dengan para pihak yang berkonflik dan upaya melalui KTT GCC. Terkait dengan pertemuan bilateral, Emir Kuwait (Syekh Sabah) mengunjungi Arab Saudi pada hari kedua blokade yaitu 6 Juni 2017, dan UEA pada 7 Juni 2017 untuk bertemu dengan para kepala negara. Dia mengirim surat, menelepon dan mengutus Menteri Luar Negeri sebagai bagian dari mobilisasi skala penuh untuk meredakan konflik. Poin yang dibicarakan dalam kunjungan ini adalah bahaya yang ditimbulkan dari konflik ini. Konflik tidak hanya berdampak kepada pihak-pihak utama, tetapi juga bagi seluruh kerangka kerja kolaborasi di antara negara-negara GCC.

Pada Desember 2019, Syekh Sabah menugaskan Wakil Menteri Luar Negeri, Khaled Al-Jarallah untuk mengunjungi Emir Qatar dan Putra Mahkota Arab Saudi. Dalam kunjungan tersebut, Khaled Al-Jarallah bermaksud untuk memastikan intervensi Kuwait konstan selama krisis atau konflik berlangsung. Poin yang dibicarakan dalam kunjungan ini adalah posisi Kuwait dalam konflik blokade. Hasil akhir pembicaraan ini adalah Qatar maupun Arab Saudi menyukai Kuwait sebagai mediator karena Kuwait juga adalah negara Teluk dan lebih akrab dengan para pemimpin Teluk daripada kekuatan regional lainnya.

Tidak hanya pertemuan bilateral dengan para pihak yang berkonflik, Kuwait juga berusaha untuk membuat dialog di dalam GCC untuk memahaminya. Upaya mediasi Kuwait menemui titik terang pada KTT GCC ke 41 tahun 2021 yang dilaksanakan di Riyadh, Arab Saudi. Bentuk mediasi Kuwait adalah mediasi jalur damai melalui dialog para pihak yang bersengketa atau bertikai. Kuwait menyerukan “solidaritas dan stabilitas”. Substansinya adalah pentingnya persatuan di antara negara-negara GCC demi mempererat keamanan kawasan, perdamaian, dan kemakmuran. KTT ini akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan damai antara Arab Saudi dan Qatar. Arab Saudi bersama dengan negara pemblokade lainnya yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Yaman, dan Mesir sepakat mencabut blokade.

Konflik blokade terhadap Qatar yang dilakukan oleh Arab Saudi dan aliansinya membuat Kuwait mengambil keputusan untuk campur tangan dan berkontribusi untuk memediasi konflik tersebut. Dalam *decision making theory* disebutkan bahwa terdapat lingkup baik dari segi sistem domestik (internal) dan sistem internasional (eksternal) yang menjadi pertimbangan suatu negara dalam membuat suatu keputusan. Penyebab Kuwait berkontribusi untuk memediasi konflik antara Qatar dengan Arab Saudi dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu: internal dan eksternal. Untuk faktor internal terdiri atas faktor politik dan ekonomi.

Dalam hal politik, para pemimpin dan intelektual di Kuwait mengatakan bahwa Kuwait mungkin juga akan diboikot dalam periode mendatang oleh negara-negara Teluk lainnya. Beberapa perwakilan parlemen Kuwait menyatakan bahwa Kuwait harus siap menghadapi kemungkinan boikot di masa depan jika permasalahan ini tidak menemukan titik terang. Atas dorongan para pemimpin, parlemen, dan intelektual Kuwait, maka Kuwait memutuskan untuk terlibat sebagai mediator dalam konflik Qatar dan Arab Saudi. Dalam hal ekonomi, keterkaitan antara blokade ini dengan perekonomian Kuwait dapat dikatakan cukup besar karena negara ini juga merupakan produsen minyak bumi. Penurunan harga minyak bumi akibat blokade juga akan berimplikasi pada devisa Kuwait Adapun faktor eksternal terkait dengan keamanan. Konflik blokade ini dapat mengganggu kestabilan kawasan Teluk yang tentunya akan berimplikasi pada aspek keamanan, termasuk keamanan nasional Kuwait.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penelitian, khususnya Terima kasih kepada Bapak Drs. Tri Cahyo Utomo, M.A dan Ibu Shary Charlotte HP, S.IP.,M.A selalu Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 yang telah menemani, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak Satwika Paramasatya, SIP.,M.A., selaku Dosen Penguji, yang sudah berkenan dan bersedia untuk menguji Skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak

Muhammad Faizal Alfian, S.IP.,M.A., selaku dosen penulis yang sudah berkenan untuk mengarahkan penulis mengenai proses pembuatan jurnal ini hingga terciptanya jurnal ini.

REFERENSI

- Abdulhadi Alajmi. (2018). The Gulf Crisis: An Insight Into Kuwait's Mediation Efforts. *International Relations and Diplomacy*, 6(10), 537–548. <https://doi.org/10.17265/2328-2134/2018.10.002>
- Agustinus, M. (2017, 6 Juni). Arab Saudi Cs Ceraikan Qatar, Harga Minyak Malah Bisa Jatuh. Retrieved from <https://finance.detik.com/energi/d-3521507/arab-saudi-cs-ceraikan-qatar-harga-minyak-malah-bisa-jatuh>
- Alenezi, A. (2020). The Regional Challenges Affecting Kuwait's National Security. *Review of Economics and Political Science*, 5(1), 57–68. <https://doi.org/10.1108/reps-06-2019-0088>
- Endarti. (2021, 10 Januari). Damai, Qatar dan Arab Saudi Buka Arus Penerbangan Besok. Retrieved from <https://akurat.co/damai-qatar-dan-arab-saudi-buka-arus-penerbangan-besok>
- Febriandi, F. (2019). Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.32787/1.ijir.2018.2.1.40>
- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: British Council.
- Fraihat, I. (2020). Superpower and Small-State Mediation in the Qatar Gulf Crisis. *International Spectator*, 55(2), 79–91. <https://doi.org/10.1080/03932729.2020.1741268>
- Kinninmont, J. (2019). The Gulf Divided: The Impact of Qatar Crisis. Research Paper Middle East and North Africa Programme.
- Köse, T., & Ulutaş, U. (2017). Regional Implications of the Qatar Crisis : Increasing Vulnerabilities. *SETA Perspective*, 31, 1–6. <https://setav.org/en/assets/uploads/2017/06/RegionalImplicationsoftheQatarCrisis.pdf>
- Miall, H., Romsbotham, O., & Woodhouse, T. (1999). *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press.
- Naser, M. (2017). Kuwait's Foreign Policy towards Regional Issues in the Middle East from 2003 to 2014. *Asian Social Science*, 13(11), 95–108. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n11p95>
- Newswire. (2017, 5 Juni). Krisis Diplomatik Qatar: Emir Kuwait Jadi Mediator. 7 Juni. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com/read/20170607/19/660091/krisis-diplomatik-qatar-emir-kuwait-jadi-mediator>
- Octaviarie, R. S. (2019). "Alasan Kebijakan Arab Saudi Melakukan Blokade Terhadap Qatar". Universitas Airlangga.
- Prasetyo, B dan Lina, M. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Triyono, A. (2018). Peliputan Media Online Atas Kebijakan Politik RI Terhadap Krisis Qatar Untuk Mendukung Diplomasi Internasional. *Jurnal Egaliter*, 1(21), 1–9. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/egr/article/view/902>
- Turmudzi, A. (2019). "Analisis Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar Ditinjau Dari Perspektif Decision Making". Universitas Islam Indonesia

- Sari, A.M. (2021, 6 Januari). Sekjen PBB sambut hasil KTT GCC Arab Saudi. 6 Januari. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/1930732/sekjen-pbb-sambut-hasil-ktt-gcc-arab-saudi>
- Siyoto dan Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo,
- Synder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. (1962). *Foreign Policy Decision- Making: An Approach to the Study of International Politics*. New York: Glencoe.
- Turak, N. (2018, 15 Desember). Qatar is 'counting on' Kuwait and other allies to resolve Gulf crisis, foreign minister says. Retrieved from <https://www.cnbc.com/2018/12/15/qatar-is-counting-on-kuwait-and-other-allies-to-resolve-gulf-crisis.html>
- Vakil, S. (2017). Iran and the GCC Hedging Pragmatism and Opportunism. Middle East and North Africa Programme. Retrieved from <https://www.chathamhouse.org/2018/09/iran-and-gcc>
- Vestergaard, B. (2011). *Conflict Resolution: Working with Conflicts*. Danish Centre for Conflict. Frederiksberg. Retrieved from <https://konfliktloesning.dk/wp-content/uploads/2017/04/ConflictResolution.pdf>
- Wintour, P. (2017, 8 Juni). Kuwait steps up efforts to end Qatar blockade. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/08/kuwait-steps-up-efforts-to-end-qatar-blockade-donald-trump>
- Wirawan, U. (2017, 7 Juni). Kuwait Diminta Jadi Mediator Kisruh Qatar. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/dunia/435078/kuwait-diminta-jadi-mediator-kisruh-qatar>
- Xing, Y. (2015). Analysis of Political Decision-Making and Its Influencing Factors. *Cross-Cultural Communication*, 11(3), 42–46. <https://doi.org/10.3968/6531>